



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LPEFD

Laporan Perkembangan Ekonomi & Fiskal Daerah

**Pembangunan dan Proyek
Strategis Daerah**

Edisi XXXI

September 2022



Executive Summary

- Dalam rangka mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional, disusun **proyek strategis nasional** yang diharapkan dapat mendukung berbagai sektor perekonomian nasional. Untuk mewujudkan proyek strategis didukung dengan berbagai sumber pendanaan salah satunya TKD. **Peran TKD** sebagai salah sumber pendanaan dalam mendukung target pembangunan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional, seperti melalui DAK Non Fisik Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) untuk program pembangunan instalasi listrik pengolahan sampah menjadi energi listrik dan Hibah, DAK Fisik, DAK Non Fisik untuk daerah pariwisata.
- **Kinerja Penyaluran TKD** menunjukkan penyaluran TKD TA 2022 sedikit lebih baik dibandingkan TA 2021 dikarenakan kepatuhan pemda yang menjadi lebih baik. Secara nominal penyaluran TKD TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,3% dengan nilai penyaluran sebesar Rp478,89 triliun atau 59,5% terhadap total Alokasi TKD 2022, di mana capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp472,91 triliun atau 59,4% dari total alokasi TKD 2021.
- **Kinerja Fiskal Daerah** triwulan III 2022 masih perlu dioptimalkan dengan kondisi capaian APBD yang masih berada dibawah 50 persen. Kontraksi masih terjadi pada sisi pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian PAD menunjukkan kinerja positif karena dorongan pertumbuhan dan penambahan jenis pajak daerah yang bersifat konsumsi. Perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya terjadi pada sisi belanja daerah, meskipun kontraksi masih terjadi akibat menurunnya realisasi belanja lainnya dan belanja pegawai. Hal ini diimbangi dengan pertumbuhan belanja modal dan belanja barang. Distribusi belanja menurut fungsi secara umum didominasi oleh fungsi pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, terdapat beberapa fungsi belanja yang mengalami kontraksi hingga Agustus 2022.
- **Kab. Jombang** terus mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis *digital smart city* dan *smart village* yang mendukung penyelesaian beberapa proyek strategis di Kabupaten tersebut. Inovasi ini hadir dengan konsep ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim. Untuk mendukung kegiatan tersebut, sinergi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan manusia bidang ekonomi dituangkan dalam kerangka prioritas kegiatan daerah tahun 2023 dengan tujuan mengurangi disparitas wilayah dan mewujudkan percepatan pembangunan sampai ke tingkat kecamatan dan desa.
- **Kabar Daerah** menyajikan informasi terkait proyek strategis nasional, diantaranya adalah pencapaian 135 proyek strategis nasional yang berhasil dibangun hingga akhir semester I 2022, peresmian **oleh Presiden RI** atas **Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A yang didanai oleh** bank sindikasi, pengerjaan rel kereta api rute Maros-Barru yang ditarget selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya pencapaian target operasi kereta pada tahun 2024, dan penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen yang diharapkan dapat menyokong industri pariwisata di Yogyakarta.
- **Editorial** membahas pengaruh kebijakan pemerintah dan pemetaan transmisi belanja APBN dan APBD konsolidasian terhadap sektor perekonomian pada tingkat regional.
- **Tajuk Kajian Pilihan** pada edisi ini membahas potensi skema pembiayaan KPDBU yang dapat digunakan dalam pembangunan infrastruktur di daerah (studi kasus KPDBU SPAM Semarang Barat) agar dapat beroperasi tepat waktu.

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	2
DAFTAR ISI	3
PEREKONOMIAN DAERAH & TRANSFER KE DAERAH	4
KINERJA PENYALURAN TKD	10
KINERJA FISKAL DAERAH	13
INOVASI DAERAH & KABAR DAERAH	17
EDITORIAL	21
KAJIAN KHUSUS	24

Perekonomian Daerah dan Transfer ke Daerah

Perekonomian Nasional, Proyek Prioritas Strategis, dan Dukungan Kinerja Penyaluran Transfer ke Daerah

Sejalan dengan tema besar dalam edisi kali ini, LPEFD menyajikan potret kinerja perekonomian nasional dan daerah dikaitkan dengan beberapa sasaran Proyek Prioritas Strategis sebagaimana tertera dalam lampiran dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Beberapa indikator sasaran pembangunan yang akan coba diulas yang relevan dengan sasaran Proyek Prioritas Strategis meliputi **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pariwisata, dan nilai tukar petani.**

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, *Major Project* melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha.

Major Project menjadi acuan penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM, RKP dan APBN tahunan. Di dalam pendanaan dilakukan langkah-langkah integrasi antar sumber pendanaan melalui Belanja K/L serta sumber-sumber pendanaan lainnya seperti Subsidi, Transfer Ke Daerah, Daerah, Masyarakat, BUMN serta sumber pendanaan lainnya. Selain itu juga diupayakan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance* serta *Output Based Transfer/Hibah* ke daerah.

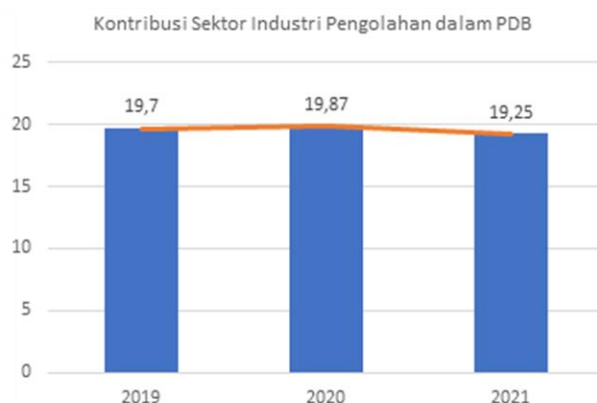


<https://www.wallpaperflare.com/>

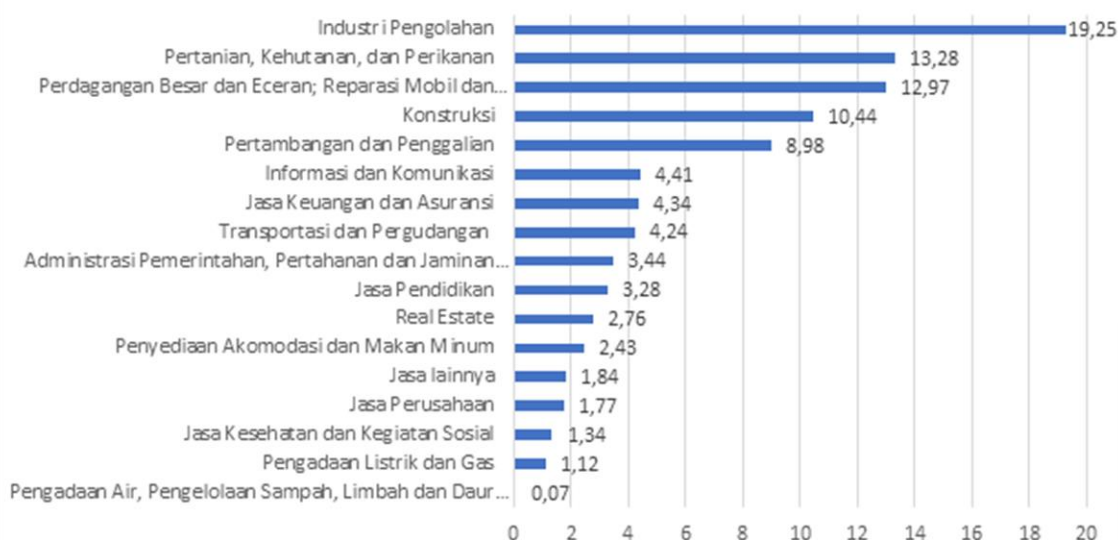
Perekonomian Daerah dan Transfer ke Daerah

▶▶▶ Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto

Paling tidak terdapat 3 sasaran Proyek Prioritas Strategis yang terkait dengan PDB/PDRB, yaitu Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas, 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter, dan Pengembangan Wilayah Metropolitan. Rincian sector pada Proyek prioritas Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas yaitu Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi. Sasaran dari Proyek Prioritas Strategis ini yaitu meningkatnya kontribusi industri dalam PDB menjadi 21,0% pada 2024.



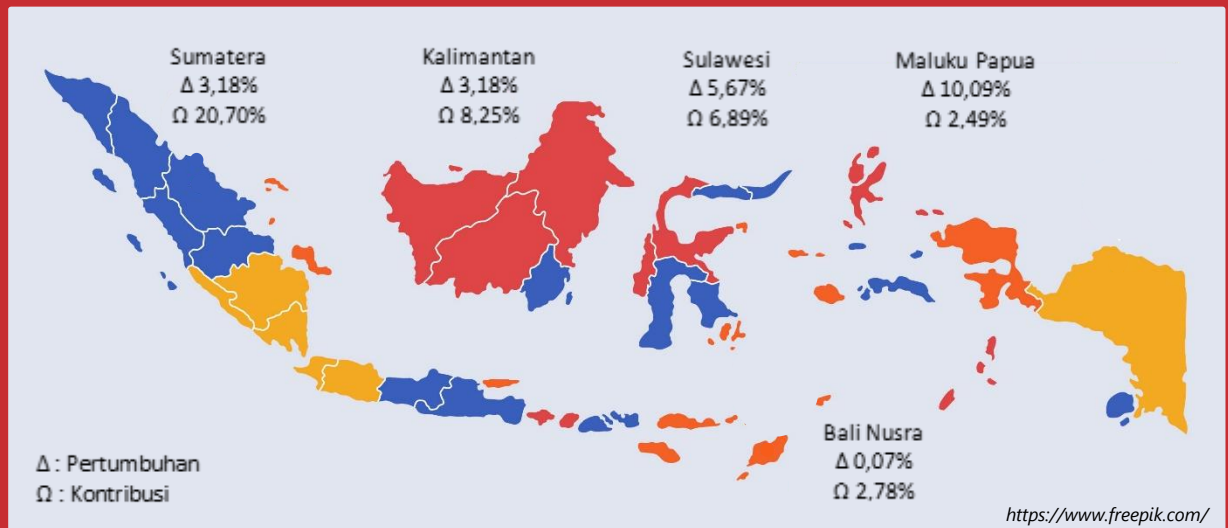
Distribusi PDB Lapangan Usaha Tahun 2021



Kondisi saat sebelum Proyek Prioritas Strategis dicanangkan, kontribusi industri dalam PDB yaitu sekitar 19,7%. Namun, pada tahun 2021, kontribusi industri dalam PDB justru turun yaitu pada kisaran 19,25%. Hal ini tidak terlepas dari situasi pandemi yang terjadi dalam hampir tiga tahun terakhir. Sektor industri pengolahan sendiri merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi dalam porsi PDB kita, disusul dengan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Perdagangan; sektor Konstruksi; baru kemudian sektor Pertambangan dan Penggalian. Dengan adanya Proyek Prioritas Strategis yaitu berupa Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas, diharapkan kontribusi sektor industri dalam PDB akan meningkat.

Perekonomian Daerah dan Transfer ke Daerah

Pertumbuhan dan Kontribusi (*Share*) PDRB menurut Wilayah Pulau Tahun 2021



Proyek Prioritas Strategis lain yang terkait dengan PDRB, yaitu 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 *Smelter*. Sasaran dari proyek ini adalah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Target rata-rata pertumbuhan di luar pulau Jawa dalam RPJMN sendiri untuk masing-masing pulau tahun 2020-2024 yaitu Sumatera 6,0%; Kalimantan 6,7%; Sulawesi 7,6%; Nusa Tenggara 6,0%; Maluku 7,3%; dan Papua 6,6%.

Sedangkan, untuk kondisi pada tahun 2021, yaitu masih pada masa pandemi, pertumbuhan untuk masing-masing wilayah yaitu Sumatera 3,18%; Kalimantan 3,18%; Sulawesi 5,67%; Bali Nusa Tenggara 0,07%; Maluku 10,09%. Dengan adanya Proyek Prioritas Strategis yaitu berupa 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 *Smelter*, diharapkan pertumbuhan di luar pulau Jawa dapat tercapai sesuai target, mengingat pandemi juga berangsur mulai hilang dan pemulihan ekonomi terus membaik.

Proyek Prioritas Strategis berikutnya yang terkait dengan PDRB, yaitu Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar. Sasaran dari proyek ini adalah meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional dan meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota didalam wilayah metropolitan. Target kontribusi (*share*) PDRB di luar pulau Jawa dalam RPJMN sendiri untuk masing-masing pulau tahun 2020-2024 yaitu Sumatera 20,9%; Kalimantan 8,8%; Sulawesi 7,0%; Nusa Tenggara 1,5%; Maluku 0,6%; dan Papua 2,1%.

Kondisi pada tahun 2021, kontribusi (*share*) PDRB untuk masing-masing wilayah yaitu Sumatera 20,7%; Kalimantan 8,25%; Sulawesi 6,89%; Bali Nusa Tenggara 2,78%; Maluku 2,49%. Dengan adanya Proyek Prioritas Strategis yaitu berupa Pengembangan Wilayah Metropolitan ini, diharapkan kontribusi PDRB di luar pulau Jawa dapat tercapai sesuai target. Di luar proyek ini juga ada pendanaan lain yang dapat secara sinergi dan simultan mendorong peningkatan kontribusi PDRB di luar pulau Jawa, antara lain optimalisasi penggunaan Transfer ke Daerah yang memang besar untuk dibelanjakan di daerah melalui APBD.

Perekonomian Daerah dan Transfer ke Daerah

▶▶▶ Pariwisata



<https://www.freepik.com/>

Proyek Prioritas Strategis yang memiliki sasaran yang terkait pariwisata yaitu 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Destinasi tersebut yaitu Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai. Sasaran dari Proyek Prioritas Strategis ini yaitu peningkatan devisa sektor pariwisata menjadi 30 miliar USD (2024), peningkatan jumlah wisatawan nusantara 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara 22,3 juta kunjungan (2024). Dalam hal ini akan dibahas mengenai jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara.

Kondisi kunjungan wisatawan mancanegara sempat turun pada masa pandemi. Pada tahun 2019, kunjungan wisata mancanegara tercatat sebanyak 16,1 juta orang, meningkat dari jumlah sebelumnya yaitu 15,8 juta orang pada tahun 2018. Namun seiring terjadinya pandemi secara global, kunjungan wisata mancanegara menurun drastis hingga hanya sebanyak 4,05 juta pada tahun 2020 dan orang dan 1,56 juta orang pada tahun 2021.

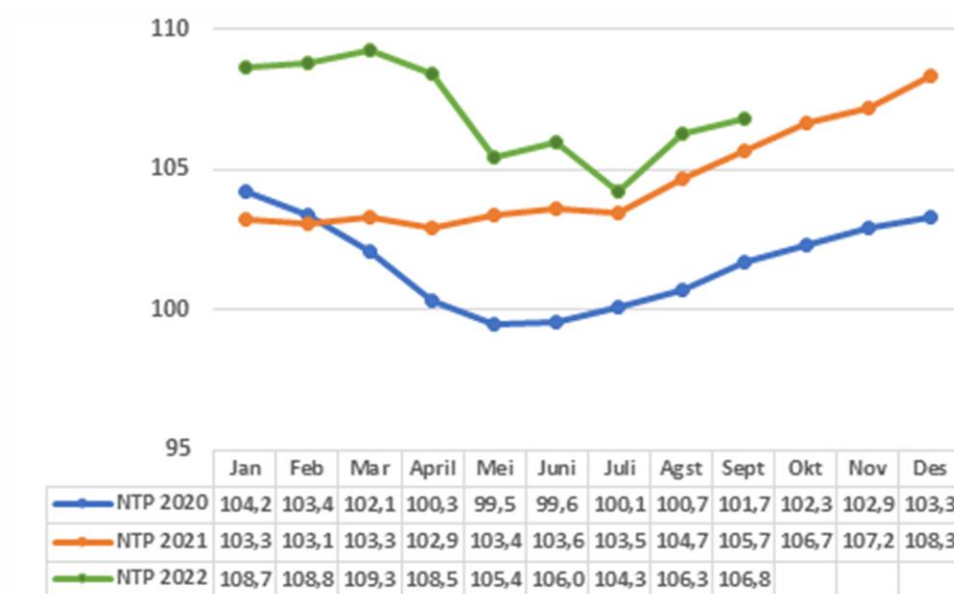
Sementara itu, kondisi jumlah perjalanan wisatawan nusantara juga sempat turun pada masa pandemi. Pada tahun 2019, jumlah perjalanan wisatawan nusantara tercatat sebanyak 722,16 juta orang, meningkat dari 303,4 juta orang pada tahun 2018. Namun seiring terjadinya pandemi pada tahun 2020 jumlah perjalanan wisatawan nusantara menurun hingga tercatat hanya sebanyak 518,59 juta orang.

Dengan adanya Proyek Prioritas Strategis berupa 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, diharapkan target peningkatan jumlah wisatawan nusantara sebanyak 350-400 juta perjalanan dan wisatawan mancanegara menjadi sebanyak 22,3 juta kunjungan dapat tercapai, seiring pemulihan situasi pandemi dan kondisi ekonomi yang terus membaik.



Perekonomian Daerah dan Transfer ke Daerah

▶▶▶ Nilai Tukar Petani (NTP)



Proyek Prioritas Strategis yang memiliki sasaran yang terkait NTP yaitu Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan. Sasaran dari Proyek Prioritas Strategis ini yaitu meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) dan meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun. Dalam hal ini akan dibahas mengenai indikator pendapatan petani dan nelayan yang direpresentasikan melalui indeks dalam NTP.

NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). Cakupan Komoditas dalam perhitungan NTP yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Subsektor Hortikultura, Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, dan Subsektor Perikanan (tangkap budidaya).

NTP justru tidak terlalu terdampak pandemi. Seperti kita ketahui, sektor pertanian pada masa pandemi relatif tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan sektor lain.

Pada tahun 2020, NTP sempat mengalami penurunan pada pertengahan tahun pada awal masa pandemi. Namun setelah itu, NTP terus meningkat. Secara umum NTP tahun 2021 lebih baik dari NTP tahun 2020, dan NTP 2022 sampai saat ini juga masih lebih baik dari tahun 2021, meskipun beberapa bulan terakhir mengalami penurunan. Dengan adanya Proyek Prioritas Strategis yaitu berupa Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan, diharapkan pendapatan petani dan nelayan yang terus meningkat.

<https://www.wallpaperflare.com/>

Perekonomian Daerah dan Transfer ke Daerah

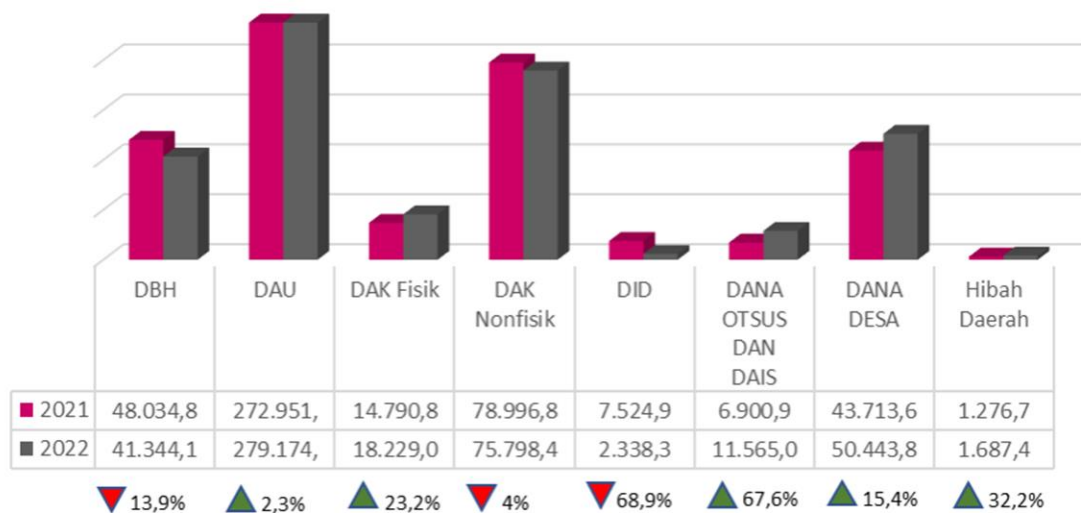
▶▶▶ Peran Transfer ke Daerah (TKD) dalam mendukung Proyek Strategis Nasional

Melalui Peraturan Menteri Koordinator Ekonomi nomor 9 tahun 2022, Pemerintah telah menetapkan 200 proyek dan 12 program strategis nasional, dimana sumber pendanaan tersebut berasal dari APBN, APBD, dan pihak swasta. Salah satu dana yang dapat digunakan untuk dapat mendukung pelaksanaan PSN tersebut adalah melalui dana transfer ke daerah (TKD), dimana pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tetap mengacu pembagian kewenangannya. Penggunaan TKD tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur pendukung program/proyek strategis nasional (PSN), ataupun dukungan non infrastruktur.

Salah satu program strategis nasional adalah program pembangunan instalasi listrik pengolah sampah menjadi energi listrik (PSEL), dimana dukungan program tersebut antara lain berasal dari dana transfer ke daerah, yaitu DAK Non Fisik Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS). Dana BLPS dianggarkan mulai tahun 2019 sebesar Rp26,91 miliar dan meningkat hingga Rp100,0 miliar di tahun 2022. Dana BLPS ini merupakan kompensasi atas jasa pengolahan sampah di lokasi tertentu yang ditetapkan, di luar biaya pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir, dimana dengan dana BLPS ini diharapkan dapat mempercepat konversi sampah yang menjadi masalah di daerah perkotaan menjadi sumber energi listrik.

Dana TKD lainnya yang diharapkan dapat mendukung PSN antara lain adalah untuk program pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional dan proyek sektor air bersih dan sanitasi. Untuk bidang pariwisata, pemerintah telah mengalokasikan transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan hibah untuk pembangunan infrastruktur, serta melalui DAK non fisik untuk peningkatan kapasitas tata kelola dan kualitas pelayanan kebersihan, keamanan, dan keselamatan di destinasi pariwisata dilakukan untuk mewujudkan tata kelola dan kualitas pelayanan yang berdaya saing. Sedangkan untuk air minum, dukungan tersebut berupa alokasi DAK Fisik dan hibah daerah. Penggunaan DAK Fisik dan hibah berupa pembangunan saluran pipa tersier yang menyalurkan langsung ke sambungan rumah.

Realisasi TKD s.d. 31 Agustus 2022



Realisasi TKD s.d. 31 Agustus 2022. Sumber: DJPK

Kinerja Penyaluran TKD

Respon kebijakan TKD hingga bulan Agustus 2022 menunjukkan penyaluran TKD TA 2022, baik secara nominal maupun tingkat penyaluran, sedikit lebih baik dibandingkan TA 2021 hal ini terjadi karena **kepatuhan pemda yang lebih baik**. Secara nominal penyaluran TKD TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,3% dengan nilai penyaluran sebesar Rp478,89 triliun atau 59,5% terhadap total Alokasi TKD 2022, di mana capaian ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp472,91 triliun atau 59,4% dari total alokasi TKD 2021.

Kinerja penyaluran Dana Otsus dan Dana Keistimewaan mengalami pertumbuhan nominal paling besar (67,6% yoy) yang disebabkan telah disalurkan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur Tahap II sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Hibah ke Daerah juga mencatatkan pertumbuhan nominal penyaluran yang positif (32,2% yoy) meskipun sebenarnya pagu TA 2022 lebih rendah dari TA 2021. Hal tersebut menunjukkan kecepatan pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah lebih baik dari tahun sebelumnya mengingat Hibah ke Daerah dilaksanakan berdasarkan *output based* dimana pemerintah daerah mengerjakan terlebih dahulu kegiatannya, kemudian mengajukan *reimburse* dana Hibah ke DJPK. Pada DAK Fisik juga tercatat mengalami pertumbuhan nominal penyaluran yang positif (23,2% yoy) karena proses lelang dan syarat salur DAK Fisik disampaikan lebih cepat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kinerja Penyaluran TKD

Peningkatan kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan syarat salur Dana Desa berdampak positif pada kinerja nominal penyaluran Dana Desa lebih tinggi dari sebelumnya (15,4% yoy). Demikian pula nominal penyaluran DAU yang mengalami kenaikan (2,3% yoy) disebabkan oleh kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Kinerja penyaluran TKD yang mengalami kontraksi atau penurunan nominal penyaluran dibanding TA 2021 terlihat pada DID, DBH, dan DAK Nonfisik. Penyaluran DID tahap I telah disalurkan seluruhnya bahkan terdapat 63 daerah yang telah disalurkan DID 100%, namun persentase lebih rendah (69,4% yoy) disebabkan pagu alokasi DID turun sebesar 48% dibandingkan TA 2021. Dari total pagu DID TA 2022 sebesar Rp7 triliun, baru Rp 4 Triliun yang dialokasikan sebagai DID atas kinerja tahun sebelumnya, sementara Rp3 triliun lainnya akan dialokasikan sebagai DID atas kinerja tahun berjalan.

Sementara itu, penyaluran DBH tercatat lebih rendah (13,9% yoy) karena pada tahun 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH sebesar Rp19,5 triliun. Untuk DBH Reguler, penyaluran TA 2022 Rp41,34 triliun lebih tinggi dibandingkan TA 2021 yang tercatat sebesar Rp28,56 triliun. Selanjutnya, penyaluran DAK Nonfisik mengalami perlambatan (4% yoy) yang disebabkan penurunan kinerja daerah dalam memenuhi syarat salur, terutama daerah penerima BOS, BOK, dan TPG yang memiliki pagu alokasi besar.

Kebijakan TKD yang berdampak pada indikator pembangunan sosial dan perekonomian di daerah antara lain berupa dukungan TKD untuk belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (termasuk masyarakat pedesaan), ketahanan pangan, dan pariwisata. Dukungan TKD pada aspek layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk membangun dan mempertahankan SDM daerah yang berkualitas di daerah agar lebih berdaya saing, terampil, inovatif, produktif, dan berkelanjutan dalam menjalankan aktivitas sosial dan perekonomian. Realisasi dukungan TKD bidang pendidikan dan kesehatan hingga bulan Agustus 2022 masing-masing sebesar Rp190,4 triliun (65,4%) dan Rp14,98 triliun (42,7%).

Kinerja Penyaluran TKD

Pada aspek penguatan daya beli, dukungan TKD perlindungan sosial dan ketahanan pangan ditujukan sebagai bantalan sosial masyarakat termasuk masyarakat petani, nelayan, rumah tangga di pedesaan di saat menghadapi tekanan inflasi dari harga komoditas energi dan pangan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa diberikan dengan besaran Rp300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan dengan penyaluran yang dilaksanakan tiap triwulan. Sebesar Rp18,17 triliun (66,8%) dari target BLT desa telah tersalurkan ke Rekening kas Daerah dimana sebesar Rp13,4 triliun telah diterima oleh masyarakat desa. Selanjutnya, realisasi TKD untuk bidang ketahanan pangan adalah sebesar Rp2,67 triliun (32,35%) dari alokasi Rp8,26 triliun yang berasal dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pada aspek infrastruktur, dukungan TKD belanja investasi infrastruktur dimaksudkan untuk menunjang dan memfasilitasi aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat daerah berupa penyediaan jalan, irigasi, perumahan/permukiman, sanitasi, dan air minum termasuk untuk kemudahan distribusi dan rantai pasok komoditas ekonomi. Realisasi TKD bidang infrastruktur adalah sebesar Rp48,43 triliun (52,67%) yang berasal dari DTU, DTI, dan DAK Fisik. Sementara pada sektor pariwisata, dukungan TKD bidang pariwisata bertujuan untuk mengembangkan kawasan destinasi pariwisata sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Realisasi TKD bidang pariwisata sebesar Rp785,8 milyar (27,46%) yang berasal dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

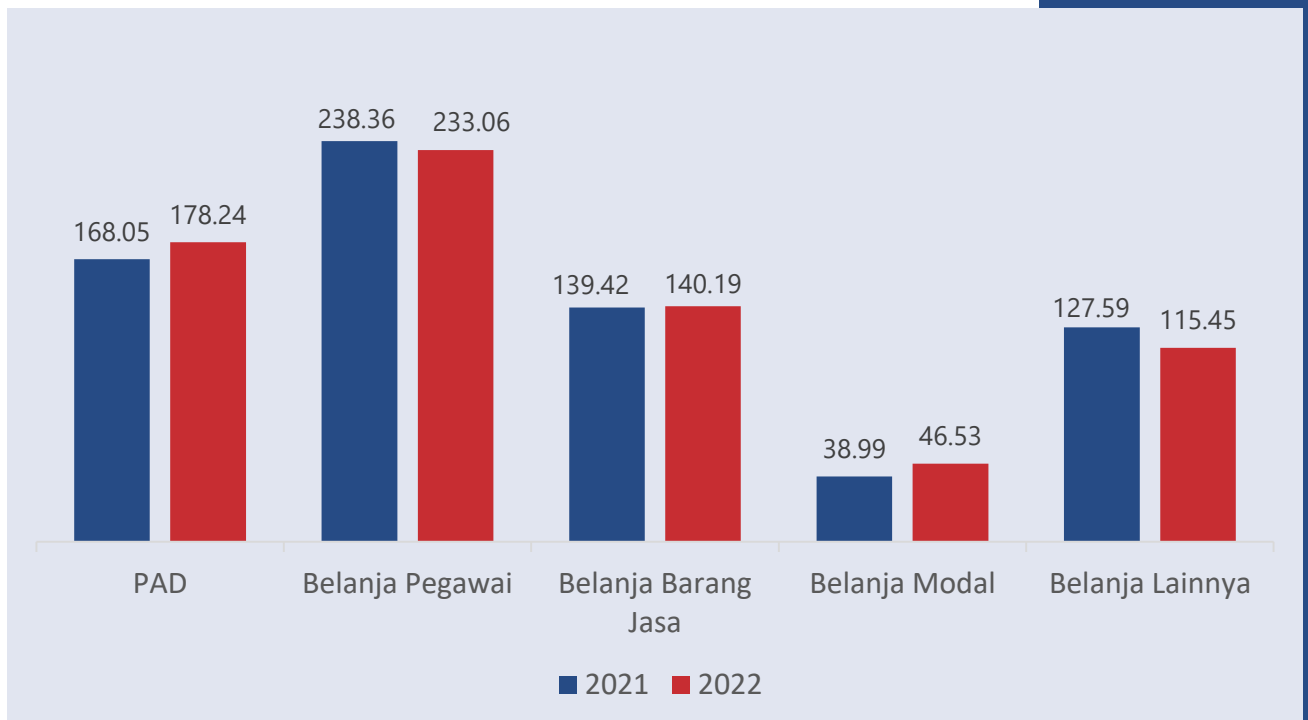


<https://www.freepik.com/>

Kinerja Fiskal Daerah

Kinerja APBD secara YoY sampai dengan bulan Agustus 2022 masih perlu terus dioptimalkan. Hal ini dikarenakan sampai dengan akhir bulan Agustus 2022, capaian belanja APBD secara tahunan masih di bawah 50 persen. Dari sisi pendapatan daerah, sampai dengan bulan Agustus 2022 pendapatan daerah mengalami kontraksi sebesar 3,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan daerah sampai dengan Agustus 2022 sebesar Rp622,81 triliun (54,7% dari target APBD).

Realisasi APBD (dalam Triliun Rp.)

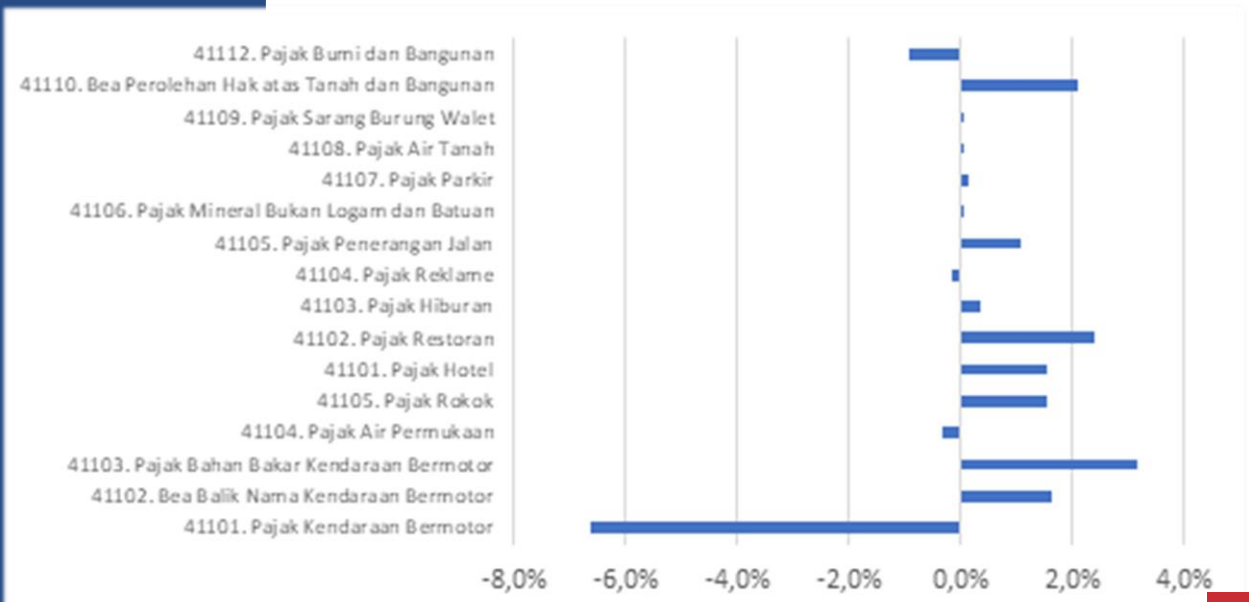


Kinerja Fiskal Daerah

Dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja PAD sampai dengan bulan Agustus 2022 sebesar Rp178,24 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 6,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PAD yang menunjukkan kinerja positif utamanya disumbangkan oleh tumbuhnya pajak daerah yang meningkat secara signifikan. Pertumbuhan pajak daerah tersebut disokong oleh peningkatan 12 dari 16 jenis pajak daerah secara tahunan. Pertumbuhan ini sekaligus memberikan optimisme yang kian kuat atas geliat aktivitas perekonomian di daerah. Terlebih lagi, pertumbuhan pajak disumbangkan oleh pajak atas aktivitas konsumsi. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak restoran merupakan pajak dengan pertumbuhan tertinggi sekaligus memberikan kontribusi utama pada pertumbuhan pajak daerah sebesar masing-masing 3,2% dan 2,4%.

Secara keseluruhan, pertumbuhan pajak daerah memberikan sinyal semakin membaiknya aktivitas sektor pertambangan galian, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, sektor jasa serta sektor utilitas seperti listrik serta layanan air.

Menariknya, pajak-pajak yang dikenakan atas aset seperti pajak kendaraan bermotor dan PBB P2 mengalami kontraksi pada 2022. Hal ini karena adanya *high base* pada tahun 2021 dimana banyak daerah memberikan berbagai stimulus dan insentif baik berupa penghapusan sanksi administratif maupun keringanan pokok pajak. Strategi tersebut berhasil mempertahankan penerimaan pajak daerah berbasis aset/properti di tengah lesunya pajak daerah berbasis konsumsi yang terkena dampak signifikan pandemi. Berkaca pada penerimaan pajak daerah berbasis aset/properti yang masih terkontraksi, daerah diperkirakan akan mulai memberikan insentif/stimulus pada sisa semester II tahun 2022 dan diharapkan akan mulai mengerek naik realisasi pajak-pajak tersebut.



Kinerja Fiskal Daerah

Mengikuti pola pendapatan daerah, belanja daerah juga masih terkontraksi hingga Agustus 2022 sebesar 1,7 persen dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp 535,23 T (44,6 persen dari target belanja APBD) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kontraksi belanja ini disumbangkan oleh komponen belanja lainnya dan belanja pegawai yang realisasinya menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja lainnya memberikan andil pada kontraksi sebesar 2,2 persen sedangkan belanja pegawai memberikan andil sebesar 1 persen. Namun pada saat bersamaan, tekanan kontraksi ini diredam oleh komponen belanja modal dan belanja barang yang tumbuh positif. Secara umum, kinerja belanja daerah hingga Agustus 2022 terus menunjukkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Belanja lainnya yang menjadi kontributor terbesar pada kontraksi belanja daerah mengalami penurunan realisasi hingga Agustus ini sebesar 9,5 persen (*yoy*). Penyebab utamanya adalah menurunnya belanja hibah hingga 41,1 persen (*yoy*) serta realisasi belanja tidak terduga hingga hanya 25 persen saja dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

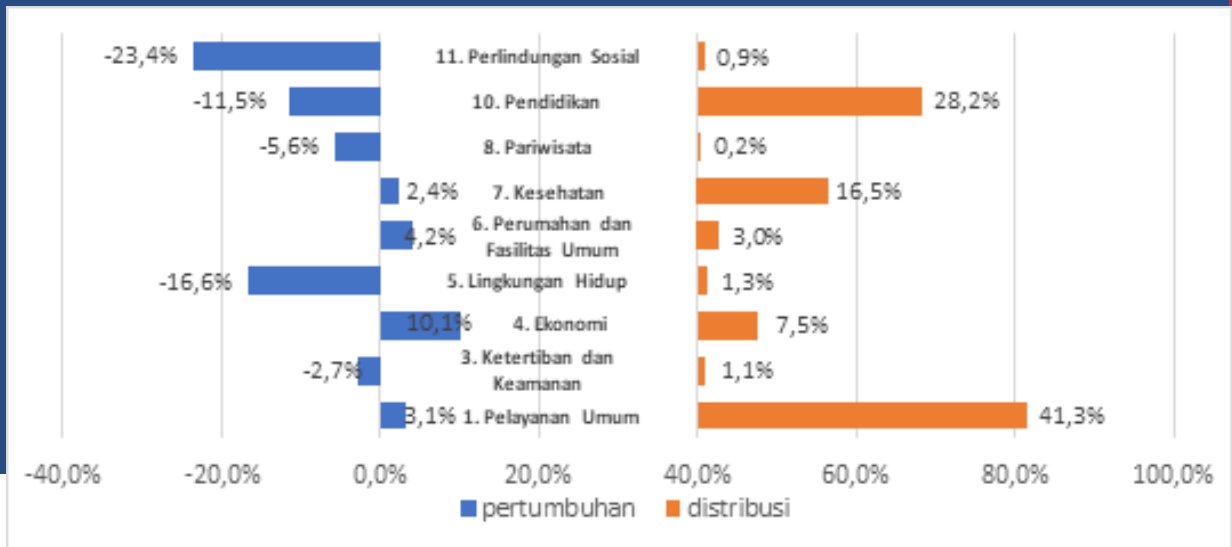
Sementara itu, terkontraksinya belanja pegawai pada periode hingga Agustus ini sumber utamanya adalah menurunnya realisasi pembayaran gaji dan tunjangan hingga 2,8 persen (*yoy*). Fenomena ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Tentu saja kontraksi ini akan memberikan tekanan pada konsumsi pemerintah.

Realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan bulan Agustus 2022 sebesar Rp 140,19 Triliun atau sebesar 41,5 persen terhadap anggarannya. Secara nominal terjadi pertumbuhan positif 0,6 persen (*yoy*) hingga periode Agustus 2022. Kenaikan tersebut utamanya disumbangkan oleh kenaikan beberapa komponen belanja yaitu belanja perjalanan dinas (46 persen), belanja lain – lain (15,2 persen) dan belanja barang BLUD (17,8 persen). Pertumbuhan dalam belanja barang jasa ini dapat sedikit meredam tekanan pada konsumsi pemerintah akibat kontraksi dari belanja pegawai.

Progresivitas kinerja terjadi pada belanja modal dimana baik capaian realisasi maupun pertumbuhan tahunannya mengalami peningkatan signifikan. Tingkat serapan belanja modal hingga Agustus 2022 membaik jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya dengan kenaikan serapan hingga 4,66 persen (*YoY*). Sebagian besar komponen belanja modal juga tumbuh positif secara tahunan. Hanya 3 (tiga) dari 24 (dua puluh empat) komponen belanja modal yang mengalami kontraksi yaitu belanja pengadaan tanah, belanja modal mebeulair dan belanja konstruksi jaringan air. Sementara itu, belanja konstruksi jalan dan belanja konstruksi/pembelian bangunan menjadi komponen belanja modal yang memberikan kontribusi terbesar pada pertumbuhan belanja modal yaitu masing – masing 8,8 persen dan 6 persen. Tumbuhnya belanja modal tentunya akan semakin memperkuat pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto dari sisi pemerintah

Kinerja Fiskal Daerah

Pertumbuhan dan Distribusi Realisasi APBD s.d Agustus 2022 Menurut Fungsi



Berdasarkan klasifikasi fungsi, terlihat 5 dari 9 fungsi mengalami kontraksi yang cukup tinggi bahkan melebihi penurunan belanja secara nasional yaitu diatas 1,7 persen. Jika dilihat dari distribusi per fungsinya, realisasi belanja hingga Agustus tahun berjalan ini didominasi oleh fungsi – fungsi besar yaitu pelayanan umum, pendidikan dan kesehatan. Proporsi ketiga fungsi tersebut bahkan mencapai 86 persen terhadap total realisasi anggaran. Fungsi Pendidikan memiliki sumbangan tertinggi pada kontraksi belanja daerah hingga mencapai 3,6 persen. Namun kontraksi tersebut sedikit bisa diredam dengan tumbuhnya belanja fungsi pelayanan umum dan ekonomi dengan kontribusi positif masing – masing sebesar 1,2 persen dan 0,7 persen.



Inovasi dan Kabar Daerah

INOVASI Kab. Jombang

Inovasi Smart City-Pelayanan Publik Berbasis Digital Menstimulus Penyelesaian Proyek Infrastruktur Strategis di Kabupaten Jombang

Memasuki tahun 2022, Jombang telah mencapai beberapa prestasi khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur dengan berbagai inovasinya. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Jombang, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang meningkat menjadi 3.24% yang sempat berkontraksi -1.98% di tahun 2020. Angka pengangguran Kabupaten Jombang mengalami penurunan sebesar 0.39 poin di tahun 2021 dengan meningkatnya IPM sebesar 73.48. Besaran IPM ini lebih besar dari IPM Provinsi Jawa Timur yaitu 72.14. Peningkatan IPM ini dipengaruhi oleh meningkatnya layanan dasar publik seperti kesehatan, pendidikan, maupun indeks pengeluaran konsumsi masyarakat. Kondisi ini merupakan output dari terobosan dan inovasi yang dimiliki Kabupaten Jombang terutama dengan pembangunan inovasi pelayanan publik berbasis *digital smart city* dan *smart village*. Inovasi publik ini telah mendukung penyelesaian beberapa proyek strategis Kabupaten Jombang seperti pembangunan pedestrian Wahid Hasyim, jembatan, rehabilitasi sekolah, bangunan kecamatan yang mengurus perizinan, puskesmas, pembangunan air limbah, serta pembangunan sentra industri kecil menengah peleburan *slag* aluminium.

Inovasi dan Kabar Daerah

Inovasi Smart City-Pelayanan Publik Berbasis Digital Menstimulus Penyelesaian Proyek Infrastruktur Strategis di Kabupaten Jombang



Inovasi berbasis *digital smart city* dan *smart village* ini menghasilkan terobosan yaitu digitalisasi proses pelayanan publik tingkat desa berbasis android, peningkatan jalan ke pusat-pusat sentra wisata, inovasi produk unggulan daerah, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan.

Selain itu, terdapat pula peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan dan pendidikan karakter. Hal ini juga dilakukan dalam rangka menanggulangi pengangguran yaitu penyediaan lapangan usaha diiringi dengan revitalisasi pariwisata dan pengembangan nilai tambah produk UMKM. Lebih lanjut, untuk memulihkan ekonomi industri Kabupaten Jombang dan meningkatkan produk unggulan Jombang, dilakukan juga revitalisasi industri dan penguatan riset terapan melalui industrialisasi dan riset serta inovasi.

Untuk mendapatkan *smart village* dan *smart city* yang ramah terhadap lingkungan, Kabupaten Jombang juga melakukan pembangunan rendah karbon dan transisi energi dan respon terhadap perubahan iklim melalui ekonomi rendah karbon serta transisi energi. Penyediaan air bersih dan sanitasi serta infrastruktur digital serta konektivitas menjadi salah satu strategi percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Normalisasi sungai (program resik kaliku), dan Jombang peduli sampah dengan penyediaan TPS-3R juga tidak hanya menjadi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan tetapi juga meningkatkan kapasitas daerah untuk penurunan risiko bencana.

Inovasi lainnya untuk mewujudkan *smart city* adalah kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang mensinergikan kebijakan bidang prasarana wilayah dan penataan ruang dan pemerintahan pembangunan manusia bidang ekonomi dalam kerangka prioritas kecamatan yang dialokasikan tahun 2023 sebesar 15,75 miliar rupiah. Sinkronisasi ini dilakukan sampai tingkat kecamatan dengan prioritas kegiatan daerah tahun 2023. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi disparitas wilayah sehingga mewujudkan percepatan pembangunan sampai ke tingkat kecamatan dan desa.

Penyusunan semua kegiatan inovasi ini terangkum pada penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Jombang yang terpilih menjadi salah satu dari 50 Kabupaten/Kota untuk difasilitasi dalam perencanaan dan implementasi *Smart City* tahun 2022.

KABAR DAERAH

➤➤ Hingga Juni 2022, 135 Proyek Strategis Nasional Selesai Dibangun.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat, saat ini terdapat 208 proyek dan 10 program yang merupakan proyek strategis nasional (PSN). Estimasi nilai investasi tersebut sebesar Rp 5.739,7 triliun. Dari Jumlah itu, sebanyak 135 PSN selesai dibangun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran APBN/APBD sebesar Rp 714,5 triliun; anggaran BUMN/BUMD sebesar Rp 1.112,1 triliun; dan alokasi anggaran dari swasta sebesar Rp 3.913,2 triliun.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP), Wahyu Utomo, menjelaskan, dari 208 proyek dan 10 program, terdapat 27 proyek dan 8 telah beroperasi sebagian, 91 proyek dalam tahap konstruksi. Lalu, 13 proyek dalam tahap transaksi, serta 37 proyek dan 2 program dalam tahap penyiapan. Estimasi penyerapan lapangan kerja PSN (*direct*) berdasarkan estimasi penyerapan investasi adalah sebanyak 1.952.396 orang selama 4 tahun (2020-2024).

Pembangunan infrastruktur PSN di berbagai sektor telah memberikan dampak yang signifikan. Pada sektor air bersih dan sanitasi, selama tahun 2016 – Juni 2022 terdapat 3 proyek SPAM dengan skema KPBU yang sudah selesai tiga proyek SPAM tersebut menambah layanan lebih dari 2 juta orang. Sektor bendungan, 48 Bendungan PSN telah terbangun, menambah persediaan air baku sebesar 2,67 miliar m³, mereduksi potensi banjir sebesar 10.300,74 m³/detik, meningkatkan pasokan air baku sebesar 10.990 lt/detik, mengairi sawah seluas 283.000 hektare, dan memproduksi 143 MW listrik. Selanjutnya, telah selesainya 14 proyek bandara yang menambah layanan kapasitas penumpang hingga mencapai 40 juta penumpang per tahun secara keseluruhan. Beberapa bandara yang mengalami peningkatan kapasitas signifikan seperti Pembangunan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo, dan Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru.

.....
Sumber : <https://nasional.kontan.co.id/news/hingga-juni-2022-135-proyek-strategis-nasional-selesai-dibangun> (diakses pada 20 September 2022)

➤➤ Presiden Jokowi Resmikan Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A Jadi Proyek Strategis Nasional.

Tol Serpong-Balaraja alias Tol Serbaja seksi 1A sepanjang sekira 4 KM telah rampung dibangun. Selain Tol Serbaraja, Tol Cibitung-Cilincing yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) diresmikan bersamaan secara hybrid oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (20/9/2022) melalui prosesi akses masuk pertama di gerbang tol Gabus. Dengan peresmian yang dilakukan Presiden Joko Widodo itu, Tol Serbaraja seksi 1A kini resmi beroperasi. Tol Serbaraja Paket 1A menghubungkan ujung jalan tol eksisting (Ulujami-Pondok Aren-Serpong) di sisi klaster The Green BSD City menuju simpang susun CBD BSD City (di sisi AEON Mall) dan terkoneksi langsung dengan kawasan Transit-Oriented Development (TOD) Intermoda BSD City. Infrastruktur konektivitas berupa ruas Tol Serbaraja Seksi 1 ini menelan total investasi sebesar Rp5,4 triliun melalui dukungan pendanaan dari bank sindikasi, terdiri dari Bank BCA, Bank Mandiri, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Bank Jabar Banten dan Bank Papua.

Presiden RI, Jokowi mengungkapkan, Tol Serpong-Balaraja seksi 1A ini adalah bagian dari tol JORR 3 yang bersama JORR 2 direncanakan rampung pada 2023. Tol ini akan terkoneksi dengan tol Jakarta-Serpong, tol Jakarta-Merak, JORR dan berbagai ruas tol di Pulau Jawa. Hadirnya Tol Serbaraja ini diharapkan dapat meringankan lalu lintas yang selama ini membebani jalan-jalan di kawasan Tangerang Raya, Banten.

.....
Sumber : <https://banten.suara.com/read/2022/09/20/123347/presiden-jokowi-resmikan-tol-serpong-balaraja-seksi-1a-jadi-proyek-strategis-nasional?page=2> (diakses pada 20 September 2022)

KABAR DAERAH



KA Maros-Barru Beroperasi Oktober: Progres di Makassar dan Parepare.

Pengerjaan rel kereta api (KA) rute Maros-Barru sepanjang 71 KM yang merupakan bagian dari megaprojek kereta api Makassar-Parepare ditarget rampung Oktober tahun ini. Adapun proyek kereta api Makassar-Parepare ini ditetapkan di RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional) yang harus tuntas tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Amanna Gappa. Amanna Gappa menyebut saat ini memang pengerjaan rel prioritas untuk rute Maros-Barru. Ini untuk mengejar proyek strategis nasional (PSN) bisa segera beroperasi. Lantaran sudah 8 tahun dimulai namun tak kunjung beroperasi lantaran selalu terhambat di pembebasan lahan. "Proyek Makassar-Parepare ini masuk PSN jadi ada jaminan anggarannya. Ada Perpres (Peraturan Presiden) yang mengatur. Harus selesai 2024 makanya harus kita akselerasi," tuturnya. Saat ini pengerjaan rel baru sampai di Palanro, Barru. Sesuai perencanaan, segmen ini masuk dalam segmen A rutenya dari Stasiun Palanro, Kabupaten Barru ke Stasiun Soreang, Kota Parepare. Salah satu kendala ke arah Parepare karena rencana jalur relnya melewati perbukitan. Opsinya yang paling memungkinkan menurut Amanna Gappa yaitu bukit tersebut harus dibuat terowongan dengan cara dibor lantaran bila diubah ke arah pesisir maka biaya perawatannya tinggi karena harus elevated atau melayang.

Sementara untuk ke arah Makassar, Amanna Gappa menuturkan menyisakan pekerjaan sekitar 10 kilometer. Ini termasuk pengerjaan rel ke arah bandara. Sehingga total pengerjaan rel kereta proyek Makassar-Parepare yang belum rampung ada sekitar 30 KM jika ditambah dengan ke arah Parepare sepanjang 20 kilometer. Saat ini pihaknya memprioritaskan pengerjaan ke arah Makassar. Pembebasan lahan ditargetkan bisa rampung tahun ini. Sehingga tahun depan sudah bisa masuk ke tahapan konstruksi atau pengerjaan rel. Pembebasan lahan kereta api untuk segmen E menuju Makassar ditargetkan rampung tahun ini. Anggaran pengadaan tanah yang disiapkan Rp 1,2 triliun. "Anggaran yang disiapkan Rp 1,2 triliun. Ini anggarannya dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) karena ini proyek strategis nasional (PSN)," jelas PPK Pengadaan Lahan Makassar-Maros BPKA Sulsel Ryco Pradana Candra. Kata Ryco, ada sekitar 83 hektare lahan yang harus dibebaskan untuk rute Makassar. Lahan di Makassar seluas 43 hektare dan Maros 40 hektare yang harus dibebaskan. Tahapan pengadaan tanah yang menjadi tahapan berikutnya merupakan wewenang BPN. Lahan yang akan dilalui jalur kereta api sesuai SK penetapan lokasi (penlok) yang diteken Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (ASS) ini nantinya akan diverifikasi dan diinventarisasi BPN.

Sumber: <https://www.detik.com/sulsel/bisnis/d-6261707/ka-maros-barru-beroperasi-oktober-begini-progres-di-makassar-dan-parepare/2> (diakses pada 20 September 2022)



Berharap Tol Jogja-Bawen Segera Rampung.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Jogja berharap tol Jogja-Bawen segera rampung. Guna menyokong targetnya naikan okupansi di saat harga tiket pesawat naik. Ketua PHRI Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Deddy Pranowo Eryono membenarkan, usaha hotel dan restoran mengalami penurunan akibat naiknya harga tiket pesawat. Namun dia merasa bersyukur, secara geografis, wilayah DIJ berada di tengah Jawa. Oleh sebab itu, Deddy mengharapkan tol Jogja-Bawen segera rampung. Lantaran keberadaannya, diharapkan dapat menyokong industri pariwisata di Jogjakarta. "Saat ini, sebagian besar wisatawan masih dominan dengan jalan darat," lontarnya.

Kepala Seksi (Kasi) Promosi dan Informasi Dinas Pariwisata (Dinpar) Bantul Markus Purnomo Adi pun mengungkapkan, kunjungan wisata di Bumi Projo tamansari mayoritas berasal dari wilayah Jawa. Kemudahan akses lalu lintas darat diharapkan dapat menyokong pertumbuhan pariwisata. Melalui aplikasi VisitingJogja tercatat, jumlah kunjungan didominasi oleh wisatawan asal Jawa Tengah dengan total 58,9 persen pada 19-21 Agustus. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan jalan tol Jogjakarta-Bawen mulai dari seksi 1-6 rampung pada awal 2024. Dikatakan, proyek tol sepanjang 76 KM itu adalah salah satu proyek strategis nasional (PSN) dengan nilai investasi Rp 14,26 triliun. Pembangunan telah dimulai pada awal 2022 untuk meningkatkan konektivitas DIJ dan Jawa Tengah. "Ruas tol Jogja-Bawen ini sangat penting dan menjadi prioritas pemerintah," kata Basuki.

Sumber : <https://radarjogja.jawapos.com/jogja-roya/2022/08/24/berharap-tol-jogja-bawen-segera-rampung/> (diakses pada 20 September 2022)

EDITORIAL



Analisis pengaruh operasi pemerintah dan pemetaan transmisi belanja APBN dan APBD konsolidasian terhadap sektor

perekonomian di level regional berdasarkan realisasi data APBN dan APBD konsolidasian YTD 2022 sampai dengan bulan September 2022 terpantau bahwa selain peran signifikan APBN (dan via TKD) sebagai *shock absorber* untuk mendukung konsumsi masyarakat melalui subsidi dan perlindungan sosial, juga terpantau empat isu regional dari catatan laporan ALCo Regional dari 34 Provinsi berupa dampak kebijakan penyesuaian harga BBM dan risiko peningkatan inflasi, pemberdayaan UMKM, optimalisasi belanja daerah serta mitigasi penumpukan SILPA di RKUD.

Secara spasial, APBD lebih berperan dalam konsumsi pemerintah pada semua regional, kecuali regional Jawa. Peran APBD berfokus pada konsumsi pemerintah di 85%, investasi pemerintah di 14%, dan dukungan konsumsi rumah tangga di 1%. Kontribusi APBN dan APBD ke sektor riil didominasi oleh regional Jawa sebesar Rp713,74 triliun atau 59,29%, dan regional Sumatera sebesar Rp193,88 triliun atau 16,11%.

Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami dinamika pada tiga bulan terakhir. Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Papua masih menjadi provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Inflasi bulan Agustus mengalami deflasi 0,21% (mtm) dan perlambatan inflasi tahunan karena deflasi kelompok makanan didorong oleh masa panen. Inflasi *administered price* dipengaruhi oleh inflasi tarif listrik, bensin dan bahan bakar rumah tangga, yang akan berdampak pada kenaikan harga komoditas lain dan inflasi di bulan September 2022. Tekanan inflasi diperkirakan masih berlanjut, antara lain didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global serta berisiko meningkat akibat kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, yang dapat mendorong inflasi pada tahun 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran $3,0 \pm 1\%$.

EDITORIAL

Salah satu sektor yang mengalami dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah sektor transportasi dan logistik. Moda transportasi umum mulai meningkatkan tarif pada hampir seluruh provinsi, terutama yang tidak memiliki alternatif transportasi seperti regional Kalimantan dan Papua. Kelangkaan BBM bersubsidi jenis solar terpantau terjadi di beberapa daerah seperti Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Maluku, sehingga berdampak ke distribusi barang. Kebijakan BBM diikuti dengan permintaan penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam kisaran 8 - 13% di beberapa wilayah seperti Riau dan Bangka Belitung. Mekanisme pasar masih mempengaruhi perubahan harga komoditas dan tidak seluruhnya dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian harga BBM.

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis mitigasi risiko peningkatan inflasi, seperti penyelenggaraan operasi pasar, melakukan pemetaan dan pemerataan pasokan kebutuhan pokok masyarakat, serta menyalurkan bantalan perlindungan sosial. Dampak nyata kebijakan mitigasi tersebut di daerah di antaranya dapat dicermati tercermin dari tetap tingginya dukungan konsumsi rumah tangga di 20%, konsumsi pemerintah di 59%, dan investasi pemerintah sebesar 21% hingga triwulan III tahun 2022. Bantalan sosial diberikan kepada masyarakat melalui (a) penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp6,19 triliun, yang disalurkan kepada 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat, (b) penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp3,43 triliun, dan (c) penganggaran belanja wajib perlindungan sosial pemerintah daerah sebesar Rp3,43 triliun. Direncanakan, penyaluran perlindungan sosial pemerintah daerah akan dimulai pada bulan Oktober 2022. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp21,35 triliun, BLT Sembako sebesar Rp31,90 triliun, BLT Minyak goreng sebesar Rp6,13 triliun, dan BLT Desa sebesar Rp19,00 triliun. Menjelang triwulan IV tahun 2022 yang identik dengan akselerasi inflasi khususnya dari belanja pemerintah maka dilakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk akselerasi bantalan perlindungan sosial termasuk pemerintah daerah terkait percepatan implementasi belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi sebagaimana diatur dalam PMK- 134/PMK.07/2022.

Pada editorial kali ini juga masih menjadi perhatian atas posisi dana pemerintah daerah di perbankan per Agustus 2022 sebesar Rp203,42 triliun, naik sebesar Rp9,96 triliun atau 5,15% (mtm) atau naik sebesar Rp24,47 triliun atau 13,67% (yoy), disebabkan belum optimalnya realisasi belanja daerah s.d. bulan Agustus 2022. Tentunya besarnya surplus dan SiLPA akan berdampak ke kontraksi likuiditas sektor moneter yang terjadi di semua regional. Terkait isu saldo SiLPA ini, di antara pertimbangan penting adalah risiko loss opportunity momentum pertumbuhan PDB yang diperkirakan akan melambat hingga akhir tahun, seperti yang disoroti oleh sejumlah leading indicators yang menunjukkan outlook pertumbuhan PDB melambat menjadi 4,9% YoY di 2H22, dari 5,2% YoY di 1H22.

Pandangan ini semakin diperkuat oleh kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih tinggi di tahun mendatang, ditambah dengan potensi turunnya daya beli konsumen dari lingkungan inflasi yang tinggi saat ini. Demikian juga dari sisi kurs nilai tukar IDR sedikit berubah setelah rilis data inflasi IHK, dan tren depresiasi berlanjut di 15.290 per USD (-1,7% dari minggu lalu) pada saat penulisan. Inflasi naik 5,95% YoY pada September 2022, terhadap perkiraan Bloomberg sebesar 6,0% serta 4,69% bulan Agustus. Kontributor utama inflasi akan mencakup kenaikan harga bensin, tarif transportasi, bahan bakar rumah tangga dan makanan, didukung oleh kenaikan harga bahan bakar yang terlihat pada awal September. Inflasi inti, yang tidak termasuk harga pangan yang dikendalikan pemerintah dan bergejolak, naik 3,21% YoY di bulan yang sama, naik dari 3,04% di Agustus.

EDITORIAL

Mempertimbangkan ekspektasi pasar terhadap Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 4,50% (dari saat ini 4,25%) di 2H22. Pada tahun 2023, BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,0%. Keseimbangan risiko, bagaimanapun, bias terhadap suku bunga kebijakan yang lebih tinggi di luar kasus dasar kami, di belakang pernyataan Federal Reserve AS yang hawkish pada September 2022 dan keputusannya untuk menaikkan Federal Funds Rate (FFR) sebesar 75 basis poin menjadi 3,00% menjadi 3,25%. Sementara ekspektasi publik menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga oleh BI mungkin terjadi, masih terdapat potensi dukungan laju pertumbuhan PDRB di tengah tekanan tambahan dari pelemahan Rupiah, bila saja laju kenaikan suku bunga harus relatif moderat dibandingkan dengan kenaikan di negara maju. Namun kebijakan makro ini juga dapat berisiko “muted” bila tidak bersambut dengan kebijakan mikro di daerah, terutama dari implementasi DAK maupun KPBU Daerah yang dapat mendorong capaian komponen PMTB dari PDRB lebih tinggi di 2022, terutama juga yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Di antara contoh sukses PSN yang melibatkan DAK dan KPBU tercatat Proyek SPAM Semarang Barat sesuai surat Menko Perekonomian kepada Menteri PUPR No. S- 55/M.EKON/03/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang menegaskan kembali bahwa skema pembiayaan proyek SPAM Semarang Barat adalah KPBU dan Penerbitan Surat Menteri PUPR kepada Walikota Semarang dengan Nomor PR.01.03-Mn/301. Proyek ini juga diulas pemutakhiran capainnya dalam LPFED edisi kali ini. Pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat mendapatkan dukungan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dukungan Pemerintah Pusat diberikan melalui Kementerian Keuangan dalam bentuk Dana Penyiapan Proyek (PT SMI (Persero)), Viability Gap Fund (VGF) dan penjaminan (PT PII (Persero)). Sedangkan melalui Kementerian PUPR berupa dukungan teknis (Intake dan Pipa JDU) melalui DAK fisik serta perizinan. Dukungan Pemerintah Kota Semarang diberikan dalam bentuk pengadaan lahan, kontribusi jaringan distribusi pembagi, pengajuan Perda KPDBU dan juga perizinan.

Sejumlah highlights dari key success factors Proyek SPAM Semarang Barat di antaranya adalah (1) Kerjasama yang baik dan konstruktif antara Pemerintah Kota Semarang (eksekutif & legeslatif), PDAM Tirta Moedal, KPPIP, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, PT SMI (Persero), dan PT PII (Persero); (2) Dukungan KPPIP dan PT SMI (Persero) dalam menyusun OBC dan FBC berstandar internasional; dan (3) Optimalisasi fasilitas PDF dan penjaminan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan yang memungkinkan Pemerintah Kota Semarang dan PDAM Kota Semarang untuk melaksanakan lelang yang sesuai dengan kaidah internasional. Dukungan fiskal dalam bentuk VGF untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek tidak diperlukan oleh BUP pemenang lelang KPDBU bahkan berdasarkan pengajuan dokumen lelang BUP memberikan diskon tarif. Selanjutnya kerjasama dengan PT PII (Persero) dilakukan untuk meningkatkan keamanan bagi investor melalui penjaminan. Sebagai hasilnya, Proyek SPAM Semarang Barat terpilih sebagai proyek KPBU untuk showcase Kementerian Keuangan dalam rangkaian acara IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali.

Komponen PMTB dari PDRB dapat mengkompensasi dorongan pertumbuhan bila kekakuan harga secara bertahap akan hilang sehingga momentum inflasi akan lebih tinggi di 4Q22. Pasar percaya bahwa inflasi lebih rendah dari perkiraan mengingat bukti anekdot dari kekakuan harga oleh bisnis ritel. Pelaku pasar memiliki ekspektasi inflasi headline akan meningkat sekitar 10% pada bulan September – Desember 2022 tanpa offset PMTB dan 6% dengan offset, dengan asumsi bahwa harga bahan bakar yang lebih tinggi sepenuhnya ditanggung oleh pengecer. Ekspektasi tersebut tidak terjadi hingga triwulan III tahun 2022, terutama di dua sektor tertentu (makanan dan transportasi). Perhatikan deflasi bulanan harga pangan (-0,3% MoM nsa) meskipun harga bahan bakar lebih tinggi terlihat pada September 2022 berkat laju PMTB. Sementara itu, harga transportasi naik 16,01% YoY (+8,88% MoM nsa), atau jauh di bawah ekspektasi pasar yang lebih besar dari 20 % YoY mengingat keputusan bisnis untuk menanggung bagian dari kenaikan harga bahan bakar. Hal yang sama juga terjadi akan ekspektasi inflasi pada sektor-sektor utama lainnya, termasuk utilitas perumahan, informasi & komunikasi, pendidikan dan kesehatan, berada di bawah ekspektasi publik.

KAJIAN KHUSUS

1

Pendahuluan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mencatat sampai saat ini terdapat 208 proyek dan 10 program yang merupakan proyek strategis nasional (PSN). Estimasi nilai investasi tersebut sebesar Rp5.739,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 135 PSN telah selesai dibangun. Alokasi anggaran yang harus dianggarkan dalam APBN/APBD sebesar Rp714,5 triliun atau 12,45 persen, sisanya berasal dari anggaran BUMN/BUMD sebesar Rp1.112,1 triliun dan alokasi anggaran dari swasta sebesar Rp3.913,2 triliun.

PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Sektor air minum merupakan salah satu jenis PSN dalam rangka mendukung program pemerintah berupa ketersediaan air minum bagi masyarakat. Salah satu proyek KPDBU yang sudah berhasil dan satu-satunya wilayah yang mendapatkan penghargaan Kategori Penghargaan Khusus Pembangunan Infrastruktur Daerah Skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) adalah SPAM Semarang Barat di Kota Semarang.

KPDBU yang sudah COD (*Comercial Operating Date*) tanggal 22 Mei 2021 ini dipilih sebagai skema pelaksanaan kegiatan karena adanya kebutuhan mendasar untuk meningkatkan layanan, kualitas dan *coverage area*, keterbatasan anggaran, pengetahuan dan pengalaman, dan berbagi risiko terkait pendanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dukungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat dan bagaimana faktor kunci sukses (*Key success factors*) Proyek KPDBU SPAM Semarang Barat dalam tahap penyiapan dan transaksi proyek. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat menambah referensi praktik dalam pelaksanaan KPDBU.

2

Tinjauan Pustaka: *Whole of Government (WoG)*

Whole of Government (WoG) merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, WoG juga dikenal sebagai pendekatan *interagency*, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Pendekatan WoG ini dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma *New Public Management (NPM)* yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Pendekatan WoG mencoba menjawab pertanyaan klasik mengenai koordinasi yang sulit terjadi di antara sektor atau kelembagaan sebagai akibat dari adanya fragmentasi sektor maupun eskalasi regulasi di tingkat sektor. Sehingga WoG dipandang sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antar sektor.

Menurut Shergold & others, (2004), WoG dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. WoG berfokus pada tiga hal yaitu pengembangan kebijakan, manajemen program dan pemberian layanan.

Pada pelaksanaan pembiayaan kreatif seperti halnya KPDBU dapat mendorong keterlibatan semua pihak dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk DPRD, dan swasta atau badan usaha).

KAJIAN KHUSUS

3

Metode Kajian

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus yang bersifat deskriptif untuk menggali makna dari hasil wawancara langsung bersama nara sumber. Pendekatan studi kasus ini menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2014) merupakan jenis pendekatan observasi dan memahami suatu kejadian atau masalah yang sudah berlangsung dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) kepada narasumber atau informan terkait. Instrumen yang digunakan adalah dengan pedoman atau panduan wawancara yang dilakukan secara terstruktur. Narasumber berasal dari Bappeda Kota Semarang selaku ketua *Stering Committee* dan Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).

4

Analisis dan Pembahasan

➤➤ Kondisi Awal

Penyiapan Proyek SPAM Semarang Barat dimulai sejak tahun 2012 dan ditargetkan memanfaatkan air di Waduk Jatibarang yang saat itu sedang dibangun dan awalnya akan mulai beroperasi di tahun 2015. Tahap penyiapan telah dimulai sejak 2012, namun pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada tahun 2015 membuat proyek sempat berada dalam kondisi terlantar atas skema pendanaan yang dipilih. Proyek SPAM Semarang Barat kemudian masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sehingga mendapat perhatian khusus dari Menko Perekonomian selaku ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP). Dasar pelaksanaan KPDBU adalah penerbitan surat Menko Perekonomian kepada Menteri PUPR No. S- 55/M.EKON/03/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang menegaskan kembali bahwa skema pembiayaan proyek SPAM Semarang Barat adalah KPBU dan Penerbitan Surat Menteri PUPR kepada Walikota Semarang dengan Nomor PR.01.03-Mn/301 yang menyampaikan bahwa skema yang didukung Pemerintah adalah KPBU.

Setelah penetapan skema pendanaan oleh KPIIP maka tahap selanjutnya adalah menuntaskan tahap penyiapan proyek menuju tahap transaksi. Pemerintah Kota Semarang secara formal melakukan penunjukkan PDAM Kota Semarang sebagai PJPK. Selanjutnya Pemerintah Kota Semarang secara intensif berkerja sama di dalam proses percepatan pembangunan SPAM Semarang Barat dengan KPIIP, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, PT SMI (Persero), dan PT PII (Persero). Berkat kerja sama semua pihak, pada Desember 2017 proyek SPAM Semarang Barat telah siap untuk masuk dalam tahap transaksi. Walaupun proyek sempat mengalami keterlambatan karena dicabutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Kota Semarang dengan kerja sama bersama KPIIP, Kemenkeu, dan pihak-pihak lainnya dapat mengejar ketertinggalan dan memenuhi targetnya sebagai Proyek Prioritas, yaitu konstruksi sebelum 2019. Dengan proses transaksi selama 10 bulan saja, dari Januari 2018 hingga Oktober 2018, SPAM Semarang Barat sukses menjadi proyek KPBU dengan proses transaksi tercepat di Indonesia. Hal itu menjadi prestasi karena proses lelang tetap mengikuti standar lelang internasional dan memenuhi ekspektasi investor internasional sebagai peserta lelang.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya SPAM Semarang Barat juga dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama adanya penjadwalan ulang pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU) ke Semarang bagian barat sebagai akibat adanya *refocusing* APBN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dapat diatasi dengan mengalirkan sementara aliran air kepada jaringan eksisting sembari menunggu penyelesaian pembangunan jalur distribusi tersebut, meskipun hal ini menyebabkan tingkat kehilangan air menjadi tinggi. Selain itu, penjadwalan ulang konstruksi tersebut juga telah menyebabkan banyaknya masyarakat di Semarang bagian barat mulai tidak sabar dan mulai menggunakan pemanfaatan air sumber nonPDAM. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi PDAM Tirta Moedal dalam mendorong masyarakat memanfaatkan SPAM Semarang Barat pasca selesainya jaringan distribusi tersebut.

KAJIAN KHUSUS

➤➤ Bentuk Dukungan Pemerintah Untuk KPDBU SPAM Semarang Barat

Pelaksanaan KPDBU SPAM Semarang Barat mendapatkan dukungan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dukungan Pemerintah Pusat diberikan melalui Kementerian Keuangan dalam bentuk Dana Penyiapan Proyek (PT SMI (Persero)), *Viability Gap Fund* (VGF) dan penjaminan (PT PII (Persero)). Sedangkan melalui Kementerian PUPR berupa dukungan teknis (*Intake* dan Pipa JDU) serta perizinan. Dukungan Pemerintah Kota Semarang diberikan dalam bentuk pengadaan lahan, kontribusi jaringan distribusi pembagi, pengajuan Perda KPDBU dan juga perizinan.

Skema Investasi SPAM Semarang Barat (dalam juta rupiah)

Komponen	BUP	PDAM	Pemkot Semarang	Pemerintah Pusat	Total
Intake				103.000	103.000
WTP, Pipa Transmisi, Resorvoir	396.671				396.671
JDU				221.061	221.061
Jaringan Sekunder dan Tersier		35.843	124.121		159.964
Switching		158.095			158.095
Working Capital (WC)	4.387	4.015			8.402
Biaya Kontruksi + WC	401.058	197.953	124.121	324.061	1.047.193
Biaya Akuisisi Lahan			100.000		100.000
Financing Fee	5.356				5.356
Total Biaya Investasi	406.414	197.953	224.121	324.061	1.152.549
IDC	52.066				
Total Biaya Investasi + IDC	458.480	197.953	224.121	324.061	1.204.615

Sumber: Perumda Air Minum Tirta Moendal Kota Semarang

Pemerintah Pusat memberikan dukungan dalam bentuk investasi *Intake* sebesar Rp103 miliar oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR dan investasi Jaringan Distribusi Utama (JDU) oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. Pelaksanaan pembangunan JDU mengalami keterlambatan karena pandemi Covid-19 dan dapat dipenuhi oleh Ditjen Cipta Karya pada Tahun Anggaran 2022.

KAJIAN KHUSUS

1. Dukungan penuh dan aktif dari Walikota Semarang sebagai PJPK di awal proyek dirancang.

Walikota Semarang hadir langsung dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Cipta Karya dan mengirim surat permohonan PDF kepada Kementerian Keuangan. Selain itu Tim Simpul KPDBU dan Tim Lelang dibentuk langsung juga oleh Walikota dan Dirut PDAM Tirta Moedal. Tim Simpul terdiri dari kelompok kerja bidang penyiapan dan kelompok kerja bidang teknis. Dalam melaksanakan tugasnya kedua kelompok kerja tersebut dapat melaporkan masalah dan meminta bantuan kepada SKPD terkait.

2. Dukungan KPIIP dan PT SMI (Persero) dalam menyusun OBC dan FBC berstandar internasional.

Dukungan KPIIP dan PT SMI (Persero) untuk mengidentifikasi kekurangan dan meningkatkan hasil studi *Outline Business Case* (OBC) menjadi standar internasional yang menarik bagi investor ternama baik domestik maupun internasional. KPIIP membantu proses penyempurnaan OBC dengan melakukan studi *Real demand survey* di area pelayanan Proyek SPAM Semarang Barat dan Perhitungan *capital expenditure* untuk porsi jaringan distribusi dan sambungan rumah Proyek SPAM Semarang Barat. PT SMI (Persero) sebagai bagian dari penugasan dalam rangka PDF melakukan penyusunan *Final Business Case* (FBC) dengan bantuan konsultan finansial, teknis, dan legal berstandar internasional.

3. Kerjasama yang baik dan konstruktif antara Pemerintah Kota Semarang (eksekutif & legeslatif), PDAM Tirta Moedal, KPIIP, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, PT SMI (Persero), dan PT PII (Persero).

Penyamaan visi atas proyek, kordinasi dan pertukaran informasi yang baik menjadi kunci kerjasama percepatan, serta penjagaan dari sisi legal terkait komitmen para pihak (contoh : Perda KPDBU yang bisa diselesaikan kurang dari 1 bulan dan penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun untuk *support* berjalannya KDPBU).

Kunci Sukses KPDBU SPAM Semarang Barat

4. Optimalisasi fasilitas PDF dan penjaminan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

Dukungan teknis dari PT SMI (Persero) memungkinkan Pemerintah Kota Semarang dan PDAM Kota Semarang untuk melaksanakan lelang yang sesuai dengan kaidah internasional. Dukungan fiskal dalam bentuk VGF untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek tidak diperlukan oleh BUP pemenang lelang KPDBU bahkan berdasarkan pengajuan dokumen lelang BUP memberikan diskon tarif. Selanjutnya kerjasama dengan PT PII (Persero) dilakukan untuk meningkatkan keamanan bagi investor melalui penjaminan. Sebagai hasilnya, Proyek SPAM Semarang Barat terpilih sebagai proyek KPBU untuk *showcase* Kementerian Keuangan dalam rangkaian acara IMF-World Bank *Annual Meeting* 2018 di Bali.

5. Kapasitas, kapabilitas, dan komitmen dari PDAM Tirta Moedal.

Sebagai PJPK dari proyek KPDBU SPAM Semarang Barat, PDAM Tirta Moedal telah menunjukkan komitmen dan usaha yang maksimal dan responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul selama penyiapan proyek tersebut. Hal ini menjadi faktor esensial dalam memastikan bahwa seluruh aspek penyiapan proyek dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

KAJIAN KHUSUS

➤➤ Dampak/Manfaat Positif Bagi PDAM, Pemerintah Daerah, Dan Masyarakat

Pelaksanaan proyek KPDBU SPAM Semarang Barat memberikan dampak/manfaat positif baik bagi PDAM, Pemerintah daerah, maupun masyarakat.

1. PDAM

Adanya SPAM Semarang Barat dapat meningkatkan kualitas dan kontinuitas pelayanan serta perluasan *coverage area*. Dimana dapat menambah kapasitas sebesar 1.000 liter/detik atau setara dengan 60.000 Sambungan Rumah Tangga (SR). Selain itu juga potensi ketersediaan air baku dan air minum.

2. Pemerintah Daerah

SPAM Semarang Barat dapat mendukung aktivitas perekonomian Kota Semarang, kita ketahui bahwa kebijakan pembatasan pemanfaatan air tanah untuk menjaga penurunan muka tanah dan intrusi air laut menyebabkan kebutuhan air khususnya untuk industri sangat dibutuhkan. Selain itu meningkatnya kontribusi pendapatan daerah dari deviden dari PDAM pada tahun 2021 sebesar kurang lebih Rp30 miliar dari laba setelah pajak sebesar Rp49,26 miliar). Pendapatan dari deviden tersebut terus naik dari tahun-tahun sebelumnya sejalan dengan kenaikan dari laba setelah pajak.

3. Masyarakat

Dengan adanya SPAM Semarang Barat dapat meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum serta membuat harga air minum terjangkau oleh masyarakat umum (layak secara ekonomis).

5

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pemerintah daerah dapat menggunakan skema KPDBU dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Dalam pelaksanaan proyek strategis nasional di daerah yang dilaksanakan dalam skema KPDBU, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan dukungan untuk keberlangsungan dan keberhasilan proyek tersebut. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk Dana Penyiapan Proyek, pembebasan lahan, perijinan dan peraturan. KPDBU SPAM Semarang Barat dapat beroperasi tepat waktu karena dukungan penuh khususnya dari Pemerintah Kota Semarang mulai dari Kepala Daerah, DPRD sampai dengan SKPD Teknis terkait.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penetapan skema pendanaan perlu dipersiapkan dengan matang, antara lain dengan melakukan verifikasi perhitungan kelayakan proyek dan kapasitas fiskal pemerintah. Selanjutnya, perlu dilakukan penetapan PJKP dengan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai untuk mengelola semua aktivitas persiapan dan pelaksanaan proyek. Kendala keterlambatan pelaksanaan proyek karena perubahan komitmen pendanaan dukungan dari kementerian teknis akibat dari adanya refocusing dan realokasi anggaran dapat dimitigasi dengan baik melalui persetujuan komitmen dari Kementerian Keuangan. Selain itu kolaborasi dan dukungan seluruh pihak sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur di daerah dalam rangka meningkatkan layanan publik.

6

Daftar Pustaka

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

Shergold, P., & others. (2004). *Connecting government: Whole of government responses to Australia's priority challenges*. Canberra Bulletin of Public Administration, 112.

Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Astera Primanto Bhakti • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Kindy R. Syahrir • Imam Mukhlis Affandi • Britany Alasen Sembiring • Ilham Hadiana • Purwandi Santoso
Isnanto Wimboro Dahrojatun • Catur Panggih Pamungkas • Poppy Suprapti • Irfan Sofi • Sigit Wahyu Kartiko
Ganjar Prihatmoko • Nanag Garendra Timur • Amrul Yusroni • Rossi Rizki Bestari • Dimas Agung Nugraha
Narits Muhammad Syafruddin • Desy Puspita A • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa
Selma Syifa Khoirunnisa • Khishbatur Rizqiyah • Netta An'amta Desli Sanati

